

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK DINASTI KEPALA DESA KEPUH KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK

Fitra Hermansyah

10040254036 (Prodi S-1 PPKn, FISH, UNESA) fittraherman@gmail.com

Agus Satmoko Adi

0016087208(PPKn, FISH, UNESA) agussatmoko@unesa.ac.id

Abstrak

Sistem politik di suatu negara akan mengalami perkembangan, dinamika sistem politik di Indonesia sendiri telah mengalami pasang surut sejak zaman Bung Karno hingga era Reformasi. Reformasi sangat menjunjung tinggi masalah kebebasan dan HAM, namun kebebasan yang dijunjung tinggi tersebut justru memberikan ruang tumbuh praktik politik dinasti. Politik dinasti adalah suatu proses regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan elite politik tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan berdasarkan hubungan darah atau kekerabatan. Salah satu praktik politik dinasti yang sedang berjalan saat ini dijumpai di Desa Kepuh, dimana telah terjadi upaya mempertahankan kekuasaan oleh keluarga Kepala Desa selama 4 periode, melihat fenomena tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap politik dinasti Kepala Desa Kepuh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik menyebar angket, sedangkan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *Simple Random Sampling* dimana kriteria sampel yang diambil adalah masyarakat dengan usia 38 – 45 tahun. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut 90,15% masyarakat memiliki kedekatan dengan kepala desa, pemahaman masyarakat tentang politik dinasti sebesar 88,5%, 90,14 % masyarakat memahami adanya faktor kuatnya politik dinasti diakibatkan jaringan kekuasaan pemimpin terdahulu hingga politik balas budi dan politik uang, 89,83% masyarakat menyadari dampak negati yang akan ditimbulkan politik dinasti, serta 80,1% masyarakat menganggap politik dinasti adalah wajar dan sah.

Kata kunci : persepsi, politik dinasti

Abstract

Political system in a country will undergo development, The dynamics of a political system in Indonesia has been subjected to tides since the days of Bung Karno to reformation era. Reform highly values freedom and human rights problems, but freedom upheld such high has given space growing practices political dynasty. Political dynasty is a process regeneration power for the interests of the elite particular political aimed at to get or of retaining power based on a relationship of blood or kinship. One practices political dynasty in its implementation found in the village Kepuh, where has happened the effort to maintain the power by the village head for 4 the period, see the phenomenon researchers feel interested to have a research. This research aims to understand how public perceptions in political dynasty village head Kepuh. This research uses the quantitative with a kind of descriptive. The data collection was done with using a technique spread chief, while technique sampling used in this research is by using technique simple random sampling where criteria samples to be taken to be people with age 38 - 45 years. The results of the study is as follows 90,15 % the highest proximity to the village, community understanding about politics of 88,5 % dynasty, 90,14 % people understand the factors strong political dynasty caused the power former political leaders to get budi and political money, 89,83 % people realize the impact of negati that will bring political dynasty, and 80,1 % the community regards political dynasty is reasonable and valid.

Keywords : perception, political dynasty

PENDAHULUAN

Seiring dengan waktu sistem politik di suatu negara akan mengalami perubahan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut dan juga faktor sejarah dalam perpolitikan di suatu negara. Pengaruh sistem politik

negara lain juga turut memberi kontribusi pada pembentukan sistem politik di suatu negara.

Perkembangan Indonesia sebagai suatu negara demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya.

Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta pembangunan karakter bangsa, dengan partisipasi rakyat, sekaligus menghindarkan diktator perorangan, partai ataupun militer. Di dalam negara demokrasi seperti di Indonesia, sangat menjunjung tinggi masalah kebebasan dan HAM.

Namun kebebasan yang dijunjung tinggi tersebut bukan kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan tersebut masih terikat oleh aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kebebasan yang tanpa batas dapat melahirkan 'kebablasan' dalam berdemokrasi, hal ini akhirnya tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif.

Seperti lahirnya politik dinasti yang kini semakin marak di Indonesia. Praktik politik dinasti ini secara prinsip tidak sesuai dengan sistem pemerintahan demokrasi yang ada di Indonesia. Sistem demokrasi ditandai oleh beberapa hal, yaitu kekuasaan pemerintah yang terbatas, negara hukum yang tunduk pada rule of law, dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Politik Dinasti dimaknai sebagai upaya seorang penguasa atau pemimpin baik di tingkat presiden/bupati/walikota yang telah habis masa jabatannya, untuk menempatkan keluarganya sebagai calon penggantinya atau penerus penguasa sebelumnya untuk periode berikutnya (Soemiarno, 2010: 20). Dengan kata lain, politik dinasti mengarah kepada suatu proses regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (misalnya keluarga elite) yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan berdasarkan hubungan darah atau kekerabatan.

Politik dinasti muncul dalam dimensi yang lebih alami, berupa upaya mendorong sanak keluarga elite-elite incumbent untuk terus memegang kekuasaan di pemerintahan yang telah diwariskan oleh pendahulu mereka. Jika dilihat secara normatif konstitusi pun menegaskan bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di mata hukum, termasuk untuk mengikuti atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik sebagai bupati/walikota, gubernur, atau presiden.

Namun tetap saja adanya politik dinasti tersebut kian hari kian meresahkan dan tentunya dapat menciderai demokrasi. Pada sisi yang lain politik dinasti lebih banyak melahirkan pemimpin prematur dan belum layak uji di masyarakat.

Karena mereka lahir dari keluarga yang telah mapan sebagai keluarga politik bukan dari perjuangan politik. Tidak adanya larangan secara konstitusi, dimanfaatkan oleh mereka yang mapan secara politik dan mapan dalam keuangan untuk terjun dalam dunia politik. Padahal selayaknya pemimpin lahir dari sebuah perjalanan

panjang membangun negeri, memiliki kemampuan dan rekam jejak yang baik di masyarakat.

Politik dinasti berlawanan dengan paham di atas karena di dalamnya yang menjadi dasar sekaligus tujuan adalah kepentingan pribadi, konsep demokrasi yang kita terima mengedepankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan yang melibatkan orang banyak. Artinya, sekali lagi mau ditegaskan bahwa politik selalu adalah urusan "yang umum" atau "yang publik". Prinsip ini tidak dapat dirubah dengan manipulasi uang, media, dan eksploitasi budaya patronase yang masih kuat.

Merujuk pada pemikiran Michels serta Clubok, Wilensky & Berghorn dapat dijelaskan bahwa politik dinasti dapat merusak sistem demokrasi sebuah negara. Kelemahan politik dinasti adalah bahwa keinginan untuk mengekalkan jabatan pada ruang lingkup dinastinya sendiri mengakibatkan kesempatan bagi warga negara lainnya menjadi terbatas atau tertutup. Berkembangnya politik dinasti ini tidak terlepas dari berbagai kekuatan yang mendukungnya sehingga meskipun secara nilai dilarang namun pada kenyataannya tetap berkembang (Pasan, 2013: 19).

Dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari segelintir orang. Maka, di dalam dinasti tidak ada politik publik karena peran publik sama sekali tidak dipertimbangkan. Dengan sendirinya, dinasti juga adalah musuh demokrasi dalam arti yang paling substansial.

Praktik politik dinasti di Indonesia, kian mengkhawatirkan. Pasalnya, kebanyakan dari penguasa hanya ingin melanggengkan oligarki kekuasaannya. Maka dari itu pelanggaran kekuasaan harus dicegah. Praktik politik dinasti di negeri ini cenderung semakin tak sehat. Itu adalah contoh, bagaimana demokrasi Indonesia masih mengalami pendangkalan, saat etika tidak pernah menjadi dasar dalam berpolitik. Lantaran selama ini begitu banyak aturan tentang pemilu yang memang tak memiliki makna. Alhasil persoalan etika tidak lagi menjadi perhatian utama masyarakat. Publik dan pemilih terlalu apatis, bahkan sebagian besar pragmatis.

Sehingga politik dinasti makin menggurita sampai ke level paling bawah kekuasaan. Karena itu elemen masyarakat yang masih kritis mesti bersikap, untuk tak lelah berikhtiar mencegah politik dinasti yang terbukti korup.

Tantangan serius ke depan adalah bagaimana melakukan perombakan besar untuk mengatasi korupsi politik dinasti dan praktik oligarki. Karena bila politik dinasti yang terbukti pernah korupsi menguasai lingkaran kekuasaan, demokrasi pun akan makin bangkrut. Karena digerogeti koruptor dalam lingkaran kekuasaan. Ini bahaya bagi masa depan politik Indonesia, maka Politik

akuntabel dan populis yang didasari ideologi sangat diperlukan. Politik dinasti menyebabkan rakyat lemah semakin terpinggirkan.

Apabila penguasa sudah tidak lagi memikirkan rakyatnya, hanya saja memikirkan dirinya, dan kekuasaan. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan merajalela, karena masyarakat akan menjadi korban. Masyarakat yang lemah akan selalu tertindas akibat cengkeraman politik dinasti. Selama ini politik dinasti di Indonesia mudah terjadi. Di mana ada uang, di situlah disitulah kekuasaan bisa diperoleh.

Bahaya dari politik dinasti adalah hasratnya untuk mengekalkan diri dan melembagakannya dalam kepolitikan. Sifat alamiahnya adalah kekuasaan politik hendak dijalankan secara turun-temurun di atas garis trah dan kekerabatan, bukan didasarkan pada kualitas kepemimpinan, tujuan-tujuan bersama, keputusan dan kerja-kerja asosiatif. Pengekalan dan pelembagaan politik dinasti dimungkinkan dengan merajalelanya politik-uang. Demokrasi diubah teksturnya sedemikian rupa bukan lagi sebagai ruang kontestasi ide, gagasan, program dan ideologi, melainkan pasar transaksi jual-beli kepentingan individu dan kelompok-kekerabatan.

Demokrasi semu lebih berupa pasar transaksi kepentingan pribadi, namun dengan menggunakan alat-alat kelengkapan demokrasi seperti partai politik, lembaga dan institusi negara, serta media massa. Peralatan sistem demokrasi tersebut digunakan bukan untuk menopang sistem demokrasi, melainkan memanipulasinya menjadi penopang sistem oligarki. Politik dipersempit menjadi ruang perebutan kekuasaan politik dan penimbunan kekayaan antar para oligarkis, sementara rakyat kebanyakan dibayar untuk berduyun-duyun melegalkan manipulasi tersebut lewat pemilu, pilkada dan aksi-aksi protes lainnya.

Politik dinasti perlu dibatasi karena pertimbangan berikut. Pertama, politik dinasti, terutama di daerah, hanya akan memperkokoh politik yang negatif. Bila jabatan-jabatan penting di lembaga eksekutif dan legislatif dikuasai oleh satu keluarga, maka mekanisme *check and balances* tidak akan efektif. Akibatnya, rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan diri dan keluarga.

Kedua, politik dinasti mengarah pada terbentuknya kekuasaan yang absolut. Bila jabatan kepala daerah misalnya, dipegang oleh satu keluarga dekat yang berlangsung lama secara terus menerus, misalnya setelah 10 tahun menjabat, kemudian digantikan oleh istrinya selama sepuluh tahun lagi, kemudian oleh anaknya dan seterusnya, maka akan muncul kekuasaan absolut yang rawan korupsi akan terbentuk.

Ketiga, politik dinasti pada masyarakat Indonesia yang pendidikan politiknya relatif kurang dan sistem

hukum serta penegakan hukum (law enforcement) yang lemah, maka akan menyebabkan proses kontestasi politik menjadi tidak adil. Keluarga yang maju dalam kontestasi politik, seperti Pemilu, akan dengan mudah memanfaatkan fasilitas pemerintah dan jaringan untuk memenangkan pertarungan seraya menyingkirkan para kompetitornya. Apalagi, bila keluargapun turut berbisnis dalam tender-tender dalam proyek pemerintah di daerah bersangkutan, maka dapat dibayangkan dana-dana pemerintah dalam bentuk proyek mudah menjadi bancakan dengan aneka warna KKNnya. Dana pemerintah seolah milik uang keluarga.

Keempat, politik dinasti dapat menutup peluang warga negara lainnya di luar keluarganya untuk menjadi pejabat publik. Tentu hal ini, bila terjadi, akan mengurangi kualitas demokrasi kita. Untuk itu memang perlu diatur agar jabatan kepala pemerintahan puncak, tidak dijabat secara terus menerus oleh satu keluarga inti secara berurutan.

Kelima, pembatasan politik dinasti diarahkan untuk meningkatkan derajat kualitas demokrasi kita dengan cara memperluas kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam jabatan-jabatan publik dan mereduksi penyalahgunaan jabatan incumbent dalam kontestasi Pemilu maupun Pemilu.

Memang, di dalam demokrasi modern politik dinasti juga tetap bisa muncul. Kita bisa melihat beberapa tipe politik dinasti dalam kepolitikan sekarang. Dalam bentuk yang halus, politik dinasti muncul dalam gejala "politik dinasti" yang mendorong anak keluarga elite-elite lama untuk terus memegang kekuasaan yang diturunkan "secara demokratis" oleh para pendahulu mereka.

Dalam jenis ini, penyesuaian terhadap etik demokrasi modern dilakukan dengan cara mempersiapkan putra-putri yang bersangkutan dalam sistem pendidikan dan rekrutmen politik yang sedemikian dini. Jadi, dengan itu, apabila mereka muncul, kemunculannya seolah-olah bukan diakibatkan oleh karena faktor darah dan keluarga, melainkan oleh karena faktor-faktor kepolitikan yang lebih wajar dan rasional.

Dalam bentuk yang lain, politik dinasti tampil dalam cara yang lebih vulgar dan identik dengan otoritarianisme. Ia muncul dari suatu sistem politik modern yang sebelumnya sudah dibekukan dan dikondisikan sedemikian rupa sehingga "rakyat" melalui wakilnya hanya bisa memilih anak/istri dari keluarga penguasa lama. Dengan demikian, di sini yang terjadi sebenarnya adalah politik dinasti yang dipilih bukan secara sukarela tetapi secara paksaan.

Dalam bentuk yang lain, politik dinasti muncul dalam konteks yang lebih unik. Politik dinasti dilakukan dengan mempertimbangkan delikasi politik demokratis dan persiapan matang untuk tidak "memalukan", dalam tipe

ini, politik dinasti muncul semata-mata sebagai bagian dari mekanisme reproduksi kekuasaan pribadi yang terang-terangan dengan memanfaatkan sistem demokrasi yang baru.

Dalam mekanisme ini politik dinasti berkolaborasi secara intens dengan politik uang, kapitalisme media, dan budaya patronase. Uang, media, dan budaya patronase dipakai dan dimanipulasi untuk "mengontrol" penampilan dan meraih justifikasi politik. Gejala ini menguat di Indonesia sekarang.

Seperti yang dijumpai di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk telah terjadi politik dinasti kekuasaan Kepala Desa selama 4 periode yang saat ini masih berjalan. Awal mula pemerintahan Kepala Desa ini dipimpin oleh sang ayah yang bernama Sumartono, ia menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 periode yaitu selama 12 tahun. Pemerintahan dengan jabatan Kepala Desa yang dipimpin oleh Sumartono yaitu sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2006. Setelah habisnya jabatan Sumartono pada tahun 2006, diadakan pemilihan Kades lagi pada tahun 2006, saat itu Sumartono mencalonkan putranya yang bernama David Wilianto sebagai Kades periode selanjutnya untuk menggantikan posisi sang Ayah sebagai Kades lama, dan David memenangkan pemilihan Kades tahun 2006 dan resmi menjadi Kades tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2012 pemilihan Kades selanjutnya diadakan lagi dan David masih mencalonkan diri sebagai Kades. David terpilih lagi menjadi Kades tahun 2012 sampai saat ini.

Kemenangan keluarga ini dalam menerapkan politik dinasti pada dua generasi pemerintahan, disebabkan oleh sejumlah besar pendukung politik yang loyal terhadap mereka. Masing-masing generasi kepala desa dari politik dinasti ini mampu memelihara loyalitas pendukungnya, bahkan dari waktu ke waktu mereka mampu memperluas jumlah pendukungnya. Artinya kepala desa pertama dari politik dinasti ini telah membangun sebuah jaringan kekuasaan, yang berhasil dipelihara dan diperkuat oleh generasi kepala desa berikutnya dari dinasti tersebut.

Loyalitas para pendukung politik ini hadir bukan tanpa sebab, mereka punya alasan tersendiri untuk tetap mendukung Dinasti keluarga Sumartono memimpin Desa Kepuh. Ada hubungan baik yang terus dijaga oleh keluarga Sumartono terhadap para pendukung politiknya, dengan memberikan berbagai keuntungan dalam bentuk materi maupun nonmateri.

Dalam konsep pertukaran sosial, mensyaratkan salah satu diantara dua pihak yg melakukan pertukaran harus memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh pihak lainnya, sedangkan pihak penerima (pihak lain tersebut) tidak memiliki sumber daya yang sama nilainya untuk dipertukarkan dengan pihak pemberi. Sehingga satu-

satunya cara untuk membalas pertukaran ini adalah dengan memberikan kepatuhan kepada pihak pemberi sumber daya tadi. Sehingga orang-orang yang berada dalam jaringan kekuasaannya merasa berkepentingan untuk terus mendukung mereka mempertahankan jabatan kepala desa, untuk menjamin distribusi materi maupun nonmateri yang mereka terima.

Melihat fenomena yang terjadi tersebut, dapat diambil opini bahwa hal tersebut salah satu bentuk politik dinasti kepala desa yang awalnya adalah pemerintahan milik sang ayah dan pada masa jabatan sang ayah telah berakhir kemudian digantikan oleh sang anak, hal itu menunjukkan bahwa sang ayah sebagai kepala desa generasi pertama dari politik dinasti ini telah membangun sebuah jaringan kekuasaan, yang berhasil dipelihara dan diperkuat oleh anaknya untuk mewarisi jabatan generasi kepala desa berikutnya.

Untuk itu penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap politik dinasti kepala desa. Menurut Rakhmat (2000:51) bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi (perception) dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Leavitt, 1997:27 dalam Soekanto).

Dalam persepsi dibutuhkan adanya objek atau stimulus yang mengenai alat indera dengan perantara syaraf sensorik, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat kesadaran (proses psikologis). Selanjutnya, dalam otak terjadilah sesuatu proses hingga individu itu dapat mengalami persepsi (proses psikologis)

Persepsi secara umum merupakan suatu tanggapan berdasarkan suatu evaluasi yang ditujukan terhadap suatu objek dan dinyatakan secara verbal. Sedangkan bentuk persepsi merupakan pandangan yang berdasarkan penilaian terhadap suatu objek yang terjadi, kapan aja, dimana saja, jika stimulus mempengaruhinya.

Persepsi yang meliputi proses kognitif mencakup proses penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam menerima suatu stimulus kemampuan manusia sangatlah terbatas, sehingga manusia tidak mampu memproses seluruh stimulus yang ditangkapnya. Yang artinya meskipun sering disadari, stimulus yang akan dipersepsi selalu dipilih suatu stimulus yang mempunyai relevansi dan bermakna baginya. Dengan demikian dapat diketahui ada dua bentuk persepsi yaitu persepsi positif dan negatif

Berdasarkan uraian diatas tersebut dapat disimpulkan ialah persepsi merupakan tanggapan seseorang mengenai kejadian kejadian serta pengalaman yang sudah teralami

dan dilihat oleh individu. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap politik dinasti kepala desa berdasarkan pengalaman dan hal-hal yang diketahui selama proses praktik politik dinasti tersebut berlangsung.

METODE

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif dirasa cocok karena penelitian bersifat mengidentifikasi permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan deskriptif memiliki makna melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Jadi penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang menggunakan instrumen penelitian dalam mengumpulkan data-data yang berupa angka yang kemudian data-data tersebut akan di gambarkan melalui informasi kualitatif dan nanti akan ditarik suatu kesimpulan.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Pendekatan deskriptif disini digunakan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

Tempat penelitian adalah lokasi atau daerah yang hendak digunakan untuk kegiatan penelitian. Tempat yang dijadikan penelitian adalah di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Alasan untuk menentukan lokasi penelitian tersebut karena karena di desa tersebut dirasa telah terjadi politik dinasti selama 4 periode yang awalnya kepala desa adalah sang ayah selama 2 periode lampau dan selanjutnya telah digantikan sang anak yang saat ini telah menjabat kepala desa selama 2 periode ini dan penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat atau warga Desa Kepuh mengenai praktik politik dinasti yang dijalankan oleh keluarga kepala Desa tersebut.

Waktu penelitian adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk kegiatan penelitian. Waktu penelitian terhitung sejak perencanaan penelitian dan proposal penelitian ini dibuat sampai dengan proses penyusunan laporan, yaitu dari bulan Februari sampai dengan Juli 2017.

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian (Arikunto, 2006:108). Pada penelitian ini yang dijadikan

populasi adalah masyarakat Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Populasi yang digunakan adalah warga Desa Kepuh yang secara memiliki usia antara 38 tahun sampai 45 tahun. Hal ini dilakukan karena warga yang memiliki usia tersebut dapat dikategorikan sebagai warga yang sudah memiliki hak pilih dan telah mengikuti pilkades dari periode pertama kejadian politik dinasti ini terjadi. Berdasarkan data kependudukan di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono.

Tabel 1 . Populasi penelitian

No	Usia	Jumlah
1	38	54
2	39	56
3	40	59
4	41	60
5	42	55
6	43	50
7	44	59
8	45	63
Jumlah		456

Sumber : Data Statistik Kependudukan tahun 2017

Menurut Sugiyono (2009 : 91) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan pertimbangan jumlah populasi yang terbatas (kurang dari 100 orang), maka populasi yang ada seluruhnya dijadikan sampel.

Dalam pengambilan sampel ini, jika subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Akan tetapi jika jumlah subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% lebih (Arikunto, 1993 : 107).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga yang memiliki jenjang usia dari 38 – 45 tahun sebanyak 456 orang. Sehingga jumlah dari populasi tersebut lebih dari 100., maka peneliti mengambil sampel sebanyak 10 - 15% dari 456 maka sampel yang diperoleh sebanyak 68 orang. Sampel diambil secara random atau acak, maksudnya peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama.

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian seiring pula dinyatakan bahwa variabel dari penelitian itu sebagai factor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau segala apa yang akan diteliti. Variabel dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap politik dinasti kepala Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuisioner atau angket secara tertutup yang dijawab oleh responden. Instrumen penelitian ini adalah berupa angket yang digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan 4

jawaban alternatif. Dalam instrument terdapat kisi-kisi instrument yang termuat beberapa indikator guna menentukan .

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002:140). Dalam pelaksanaannya, responden diminta untuk memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup, dimana item pertanyaan pada angket tidak memberikan keleluasaan bagi responden untuk mengemukakan alasan atas pilihan jawaban yang disediakan, sehingga reponden hanya memilih jawaban yang dinilainya sesuai

Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiono, 2009 :93).

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2009:119) pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Instrumen pada penelitian ini berupa angket dan wawancara .kisi-kisi dari instrumen penelitian ini tercantum pada tabel 2 dibawah in.

Tabel 2 Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Presepsi Masyarakat terhadap Politik Dinasti Kepala Desa	Kedekatan personal dalam hubungan kemasyarakatan dengan kepala desa	Sosok Kepala Desa di mata Masyarakat
		Pengaruh figur Kepala Desa periode sebelumnya dalam PILKADES
		evaluasi Masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa
	Pengetahuan Masyarakat tentang Politik Dinasti	Pemahaman makna politik dinasti oleh masyarakat
		Pengetahuan masyarakat terhadap adanya praktik politik dinasti di Indonesia
		Pemahaman masyarakat tentang legalitas politik dinasti
	Pemahaman masyarakat adanya Faktor Pendukung kuatnya politik	Adanya keinginan dalam diri atau keluarga untuk tetap berkuasa
		Adanya kolaborasi antara penguasa dan tokoh

	dinasti	masyarakat
		Adanya pertukaran sosial yang dijaga antara penguasa dan pendukungnya
	Kesadaran masyarakat akan dampak Negatif yang akan ditimbulkan dari Penerapa Politik Dinasti	Tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi
	Anggapan masyarakat mengenai Politik Dinasti Kepala Desa	Politik Dinasti membuat orang yang tidak kompeten menjadi memiliki kekuasaan Sudut pandang masyarakat terhadap Politik Dinasti Kepala Desa

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2006: 169).

Menurut Sugiyono (2011:333) berdasarkan penelitian yang dilakukan nilai r tabel berdasarkan jumlah kuisisioner 68 responden dari taraf kesalahan 5% maka diperoleh hasil r tabel = $df = n-2 = 68-2 = 66$, maka diperoleh nilai r tabel sebesar 0,2012. Hasil uji validitas dalam penelitian ini dari 20 item soal didapati yang tidak valid adalah 4 item soal yaitu pada nomor 2,6,8,20 dan yang valid 16 item soal.

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006: 178). Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila data memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun diambil tetap akan sama. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 22 untuk menghitung reliabilitas dengan taraf signifikasi 5% menggunakan rumus alpha maka data dapat dikatakan reliabel jika > 0.700 , dalam penelitian yang dilakukan menunjukan koefisien skala atau Cronbach's Alpha sebesar 0,767, yang mana nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,806 > 0.700 . yang mana menunjukan bahwa koefisien reliabilitas dalam penelitian ini reliabel.

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2009 : 147). Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Hasil akhir dalam prosentase

n = Jumlah jawaban responden per option

N = Jumlah seluruh responden

Sebelum melakukan presentase, terlebih dahulu dilakukan penilaian atau skoring terhadap masing-masing jawaban yang tersedia dalam angket, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 Penilaian / Skoring Angket

Jawaban	Skor Positif	Skor Negatif
Sangat Setuju	4	1
Setuju	3	2
Tidak Setuju	2	3
Sangat Tidak Setuju	1	4

Selanjutnya agar hasil penelitian ini dapat dikualifikasikan maka perlu ditentukan kriteria penilaian seperti tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 4 Kriteria Akhir Jawaban Responden

Range	Kategori
0 - 20 %	Sangat Rendah
21 - 40 %	Rendah
41 - 60 %	Sedang
61 - 80 %	Tinggi
81 - 100 %	Sangat Tinggi

Berdasarkan kriteria tersebut kemudian digunakan untuk Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Kepuh

Keadaan geografis Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, keadaan cuaca beriklim tropis yang meliputi dua musim (musim kemarau dan musim hujan). Luas wilayah 170 Ha dengan luas untuk pemukiman umum 41,84 Ha, dan selebihnya persawahan, ladang, perkantoran, kuburan, dan pekarangan.

Jarak terhadap ibu kota kecamatan 1 km, jarak terhadap ibu kota kabupaten 21 km. daerah yang membatasi Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan batasan-batasan sebagai berikut: a) Sebelah utara : Desa Pelem Patianrowo b) Sebelah selatan : Desa Tanjung Ngronggot c) Sebelah barat : Desa Nglawak Kertosono, d) Sebelah timur : Desa Tembarak Kertosono

Sementara itu berdasarkan statistik tahun 2017 bahwa jumlah penduduk Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk berjumlah 3.144 jiwa. Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurangnya penduduk, karena diakibatkan adanya angka kematian dan kelahiran disamping itu juga adanya penduduk yang pindah ke daerah lain atau kekota diluar wilayah Kertosono.

Mata pencaharian terbesar masyarakat Desa Kepuh sebagai petani, buruh tani, dan pekerja pabrik sisanya sebagai PNS dan pedagang. Secara geografis desa Kepuh dikelilingi oleh area persawahan. Bertani merupakan ciri khas masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

Perkembangan pembangunan desa Kepuh baik dari segi fisik maupun non fisik telah mengalami perubahan yaitu dengan adanya pembangunan berbagai infrastruktur umum berupa pembangunan jalan, pengadaan air bersih, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dari aspek pendidikan, masyarakat mulai menilai bahwa pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi masa depan seseorang. Hal tersebut merupakan gambaran bahwa perubahan global yang melanda dunia merupakan tantangan bagi masyarakat. Peningkatan pendidikan pada masyarakat telah merubah pola pikir dan tingkah laku seseorang dalam bertindak. Hal tersebut tentunya juga akan berpengaruh terhadap tindakan dalam menanggapi berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat dengan cara pandang yang berbeda yaitu dengan pendekatan yang logis.

Data dari penelitian ini didapatkan berdasarkan hasil observasi serta kuisioner yang telah dibagikan kepada 68 terkait dengan persepsi masyarakat terhadap politik dinasti kepala desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk

Untuk itu dari 20 pernyataan angket terdiri dari 5 indikator yang diukur oleh peneliti sehingga hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Persepsi Masyarakat Desa Kepuh

Dalam indikator Kedekatan Personal dalam hubungan kemasyarakatan dengan Kepala Desa terdiri dari 3 sub indikator yaitu sosok kepala desa di mata masyarakat ,pengaruh figur kepala desa periode sebelumnya dalam pemilihan kepala desa, evaluasi masyarakat terhadap kinerja kepala desa adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 7. Sub Indikator Pemahaman masyarakat adanya Faktor Pendukung Kuatnya Politik Dinasti

No	Pernyataan	Jumlah Responden				Skor
		SS	S	TS	STS	

1	Saya mengenal kepala desa Kepuh karena sosok yang populer dan banyak dikenal masyarakat	43	25	0	0	247
2	Saya juga mengenal kepala desa sebelumnya	46	22	0	0	250
3	Figur kepala desa Kepuh sebelumnya mempengaruhi terpilih anaknya yang menjadi kepala desa saat ini	47	13	6	2	241
4	Kinerja kepala desa saat ini lebih baik dari kepala desa sebelumnya	48	14	3	3	243
Rata-rata						245
Sangat Tinggi						

Sumber : Hasil kuisioner

Sub Kedekatan personal dalam hubungan kemasyarakatan dengan kepala desa dengan pernyataan Saya mengenal kepala desa Kepuh karena sosok yang populer dan banyak dikenal masyarakat 43 orang menyatakan sangat setuju dengan jumlah nilai 172, sementara 25 orang lainnya menyatakan setuju terhadap sosok kepala desa Kepuh dengan nilai sebesar 75, sedang responden menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang dengan nilai 0. Total skor yang didapat pada pernyataan pertama adalah 247.

Pernyataan kedua adalah Saya juga mengenal kepala desa sebelumnya, terdapat 46 orang menyatakan sangat setuju dengan nilai 184, serta yang menyatakan setuju sebanyak 22 orang dengan nilai 66, serta 0 orang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju masing masing dengan nilai 0. Total skor yang didapat pada pernyataan kedua adalah 250.

Pernyataan ketiga, Figur kepala desa Kepuh sebelumnya mempengaruhi terpilih anaknya yang menjadi kepala desa saat ini. Dari data yang diperoleh 47 orang menyatakan sangat setuju dengan nilai 188, serta 13 orang menyatakan setuju dengan nilai 39 dan masing-masing 6 orang menyatakan tidak setuju dan 2 orang sangat tidak setuju dengan masing-masing nilai 12 dan 2, total skor dalam pernyataan ketiga adalah 241.

Pernyataan keempat adalah Kinerja kepala desa saat ini lebih baik dari kepala desa sebelumnya, terdapat 48 orang menyatakan sangat setuju dengan nilai 192, serta yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang dengan nilai 42. Sedang terdapat 3 orang yang menjawab tidak setuju dengan skor nilai 6 dan sisanya 3 orang menjawab sangat tidak setuju dengan nilai 3. Total skor yang didapat pada pernyataan keempat adalah 243.

Berdasarkan hasil tersebut, terkait dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh berdasarkan sub indikator Kedekatan personal dalam hubungan kemasyarakatan dengan kepala desa didapatkan nilai rata-rata hasil jawaban responden sebesar 90,15%, dengan demikian kriteria penilaian Kedekatan personal dalam hubungan kemasyarakatan dengan kepala desa masuk dalam kategori sangat tinggi hal tersebut membuktikan bahwa keluarga Kepala Desa mampu menjaga hubungan yang baik dengan masyarakatnya sehingga jaringan yang dibangun dengan pendukungnya sangat lah kuat.

Tabel 6. Sub Indikator Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik Dinasti

No	Pernyataan	Jawaban Responden				Skor
		SS	S	TS	STS	
1	Pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan secara turun temurun dalam satu keluarga merupakan bentuk dari politik dinasti	42	15	8	3	232
2	Politik dinasti merupakan strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki dalam lingkup kekerabatan.	38	28	2	0	242
3	Fenomena politik dinasti sudah berlangsung di beberapa daerah di Indonesia	47	14	5	2	242

4	Politik dinasti menjadi tren politik pejabat publik saat ini	37	27	4	0	237
5	Sejatinya politik dinasti tidak dilarang di Indonesia karena proses pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat	51	12	3	2	248
Rata – Rata						240
Sangat tinggi						

Sumber : Hasil kuisioner

Sub indikator pengetahuan masyarakat tentang politik dinasti, yang pertama adalah Pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan secara turun termurun dalam satu keluarga merupakan bentuk dari politik dinasti sebanyak 42 orang menyatakan sangat setuju dengan skor sebesar 168 dan 15 orang menyatakan setuju dengan skor 45, sedang 8 orang menyatakan tidak setuju dengan skor 16 dan 3 orang menyatakan sangat tidak setuju dengan skor 3, sehingga diperoleh nilai jawaban Pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan secara turun termurun dalam satu keluarga merupakan bentuk dari politik dinasti sebanyak 232

Pernyataan kedua Politik dinasti merupakan strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki dalam lingkup kekerabatan, 38 orang menyatakan sangat setuju dengan skor 152, serta 28 orang menyatakan setuju dengan skor 84 dan sisanya 2 orang menyatakan kurang setuju dengan skor 6.

Selanjutnya pernyataan ketiga Fenomena politik dinasti sudah berlangsung di beberapa daerah di Indonesia, 47 orang menyatakan sangat setuju dengan skor sebesar 188 dan 14 orang menyatakan setuju dengan skor 42 dan sisanya 5 orang menyatakan kurang setuju dengan skor 10 ,lalu 2 orang menyatakan sangat tidak setuju dengan skor 2

Selanjutnya pernyataan keempat, 37 orang menyatakan sangat setuju dengan skor sebesar 148 dan 27 orang menyatakan setuju dengan skor 81 serta menyatakan tidak setuju 4 orang dengan skor 8

Pernyataan terakhir Sejatinya politik dinasti tidak dilarang di Indonesia karena proses pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat dalam sub indikator ini. Sebanyak 51 orang menyatakan sangat setuju dengan

skor 204 dan 12 orang menyatakan setuju dengan skor 36 sisanya 3 orang menyatakan kurang setuju dengan skor 6 dan 2 orang menyatakan tidak setuju dengan skor 2.

Berdasarkan Tabel 6 terkait dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh berdasarkan sub indikator pemahaman masyarakat tentang politik dinasti didapatkan nilai persentase rata-rata hasil jawaban responden sebesar 88,3%, dengan demikian hasil penilaian pemahaman masyarakat tentang politik dinasti masuk dalam kategori sangat tinggi hal tersebut menunjukkan bahwa secara pengetahuan umum sebagian masyarakat memahami konsep politik dinasti meskipun hanya secara pengertian sederhana

Tabel 7. Sub Indikator Pemahaman masyarakat adanya Faktor Pendukung Kuatnya Politik Dinasti

No	Pernyataan	Jumlah Responden				Skor
		SS	S	TS	ST S	
1	Politik dinasti terjadi disebabkan oleh adanya keinginan dalam diri atau keluarga kepala desa untuk melanjutkan kekuasaan	55	11	2	0	257
2	Jaringan kekuasaan yang telah dibangun kepala desa sebelumnya membuat penerusnya mudah mempertahankan warisan kekuasaan	34	27	7	0	231
3	Kepala desa menggandeng para tokoh masyarakat untuk berkampanye	43	23	2	0	245
4	Adanya politik balas budi antara kepala desa dan	39	27	2	0	243

	pendukungnya					
5	adanya politik uang dalam proses pemilihan	49	16	3	0	250
Rata-rata						245
Sangat Tinggi						

Sumber : Hasil kuisioner

Sub indikator yang pertama dalam faktor pendukung kuatnya politik dinasti yaitu Politik dinasti terjadi disebabkan oleh adanya keinginan dalam diri atau keluarga kepala desa untuk melanjutkan kekuasaan mendapatkan total skor 257 dengan perincian 55 orang memilih sangat setuju dengan skor sebesar 220 dan yang memilih setuju terdapat 11 orang dengan skor sebesar 33, dan sisanya 2 orang memilih kurang setuju dengan skor sebesar 4.

Pernyataan kedua, Jaringan kekuasaan yang telah dibangun kepala desa sebelumnya membuat penerusnya mudah mempertahankan warisan kekuasaan memperoleh skor 231 dengan perincian: 34 orang menyatakan sangat setuju dengan skor sebesar 136, 27 orang menyatakan setuju dengan persentase 81, serta 7 orang sisanya memilih kurang setuju dengan skor sebesar 14.

Pernyataan ketiga dalam sub indikator ini mengenai Kepala desa menggandeng para tokoh masyarakat untuk berkampanye, total skor adalah 245 dengan penjelasan sebanyak 43 orang yang memilih sangat setuju dengan skor 172, 23 orang menyatakan setuju dengan skor 69, dan 2 orang memilih kurang setuju dengan skor 4

Pernyataan keempat, Adanya politik balas budi antara kepala desa dan pendukungnya mendapatkan skor nilai 243, dimana, 39 orang memilih sangat setuju dengan skor 156 dan 27 orang memilih setuju dengan skor sebesar 81, sedang 2 orang memilih kurang setuju dengan skor 6.

Pernyataan kelima, adanya politik uang dalam proses pemilihan 49 orang memilih sangat setuju dengan skor sebesar 196, 16 orang memilih setuju dengan skor 48 sisanya 3 orang memilih kurang setuju dengan skor 6. Dengan total skor yang diperoleh 250.

Berdasarkan Tabel 4.8 hasil penilaian terkait dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh berdasarkan sub indikator faktor pendukung kuatnya politik dinasti didapatkan nilai persentase rata-rata hasil jawaban responden sebesar 90,14% dengan demikian hasil penilaian pemahaman masyarakat akan adanya faktor pendukung kuatnya politik dinasti kepala Desa Kepuh pada dikatakan sangat tinggi hal tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, masyarakat memahami akan adanya faktor

pendukung yang membuat keluarga Sumartono mampu melanggengkan Politik Dinastinya.

Tabel 8. Sub Indikator kesadaran masyarakat akan dampak Negatif yang akan ditimbulkan dari Penerapan Politik Dinasti

No	Pernyataan	Jumlah Responden				Skor
		SS	S	TS	STS	
1	Politik dinasti membuat banyaknya penyelewengan kekuasaan akibat dipimpin oleh pemimpin yang tidak berkualitas	41	25	2	0	243
2	Politik dinasti akan membuat matinya kesempatan bagi pemimpin yang handal dan berkualitas	52	15	1	0	255
3	Nilai dan prinsip demokrasi tidak akan terlaksana apabila terjadi penerapan politik dinasti	49	16	3	0	250
4	Politik dinasti menciptakan para pemimpin yang tidak berkompeten tetapi tetap memiliki kekuasaan	44	18	6	0	242
5	Politik dinasti melahirkan pemimpin yang prematur dan belum layak uji di	36	24	8	0	232

	masyarakat					
Rata-rata						244
Sangat Tinggi						

Sumber : Hasil kuisioner

Sub indikator yang keempat mengenai kesadaran masyarakat akan dampak Negatif dari Penerapan Politik Dinasti. Dalam sub indikator terdapat 5 pernyataan yaitu, yang pertama adalah Politik dinasti membuat banyaknya penyelewengan kekuasaan akibat dipimpin oleh pemimpin yang tidak berkualitas sebanyak 41 orang menjawab sangat setuju dengan skor nilai 164, lalu 25 orang menjawab setuju dengan skor 75 poin, dan 2 orang menjawab tidak setuju dengan skor 4, dan 0 orang menjawab sangat tidak setuju dengan nilai skor 0, total pernyataan pertama diperoleh hasil 243 poin.

Dan pernyataan kedua Politik dinasti akan membuat matinya kesempatan bagi pemimpin yang handal dan berkualitas sebanyak 52 orang menyatakan sangat setuju dengan skor nilai 255 dan 15 orang menyatakan setuju dengan skor 45, sisanya 1 orang menyatakan tidak setuju dengan skor 2.

Pernyataan ketiga mengenai Nilai dan prinsip demokrasi tidak akan terlaksana apabila terjadi penerapan politik dinasti, 49 orang menyatakan sangat setuju dengan skor 196, serta 16 orang menyatakan setuju dengan skor 48 dan 3 orang menyatakan tidaksetuju dengan skor 6.

Selanjutnya pernyataan keempat mengenai Politik dinasti menciptakan para pemimpin yang tidak berkompeten tetapi tetap memiliki kekuasaan, 44 orang menyatakan sangat setuju dengan skor sebesar 176 dan 18 orang menyatakan setuju dengan skor 54, untuk menyatakan kurang setuju 6 orang dengan skor 12 sehingga didapatkan skor sebanyak 242

Pernyataan terakhir dalam sub indikator ini mengenai Politik dinasti melahirkan pemimpin yang premature dan belum layak uji di masyarakat. Sebanyak 36 orang menyatakan sangat setuju dengan skor 144 dan 24 orang menyatakan tahu dengan skor 72 sisanya 8 orang menyatakan kurang setuju dengan skor 16.

Berdasarkan Tabel 8. hasil penilaian terkait dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh berdasarkan sub indikator kesadaran masyarakat akan dampak negative dari penerapan politik dinasti didapatkan nilai persentase rata-rata hasil jawaban responden sebesar 89,3% , dengan demikian hasil dari kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif yang akan ditimbulkan dari penerapan politik dinasti pada dikatakan sangat tinggi hal tersebut meunjukkan bahwa secara normatif atau secara nilai masyarakat sadar dan mengetahui bahwa politik dinasti akan menimbulkan dampak negatif .

Tabel 9 Sub Indikator Anggapan Masyarakat Mengenai Politik Dinasti Kepala Desa

No	Pernyataan	Jumlah Responden				Skor
		SS	S	TS	ST S	
1	Politik dinasti kepala desa saat ini hal yang wajar dan sah sah saja	33	21	9	5	218
Rata-rata						218
Tinggi						

Sumber : Hasil kuisioner

Sub indikator Anggapan Masyarakat Mengenai Politik Dinasti Kepala Desa memperoleh nilai skor 218, hasil tersebut diperoleh dari pernyataan Politik dinasti kepala desa saat ini hal yang wajar dan sah sah saja 33 orang menyatakan sangat setuju dengan nilai 132, sementara 21 orang lainnya menyatakan setuju dengan nilai sebesar 63, sedang 9 orang menyatakan kurang setuju dengan skor 18 serta 5 orang yang lain menyatakan kurang setuju dengan skor 5.

Berdasarkan Tabel 9 hasil penilaian terkait dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh berdasarkan sub indikator anggapan masyarakat mengenai politik dinasti kepala desa didapatkan persentase nilai rata-rata hasil jawaban responden sebesar 80,1%, dengan demikian hasil prosentasi anggapan masyarakat mengenai politik dinasti kepala desa kepala Desa Kepuh pada dikatakan Tinggi hal tersebut membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat masih menghendaki kepemimpinan keluarga Sumartono atau memandang politik dinasti kepala desa tersebut bukan hal yang negatif .

Pembahasan

Kepala desa merupakan sosok elit lokal, dimana sebagai pimpinan masyarakat, dia juga mempunyai kedudukan dan status sosial yang tinggi di kalangan masyarakat. Keadaan tersebut sangat mendukung bagi terlaksananya mobilisasi politik yang dilakukan oleh kepala desa. Berbagai pendekatan politik yang dilakukan oleh kepala desa selama ini nampaknya telah membuat masyarakat menjadi tidak berdaya secara politik. Masyarakat dijadikan obyek politik melalui program pembangunan, untuk kepentingan politik tertentu.

Bagi masyarakat desa kehadiran kepala desa sangat membantu bagi berlangsungnya proses administrasi kependudukan. Interaksi antara kepala desa dan warga masyarakat telah menimbulkan hubungan yang harmonis.

Jalanan interaksi keduanya tidak hanya berjalan pada saat melayani pembuatan administrasi kependudukan melainkan juga terjalin pada forum-forum kemasyarakatan. Kepala desa dijadikan sebagai sosok pemimpin yang diharapkan dapat memberikan arahan bagi masyarakat. Sehingga hampir pada setiap forum kemasyarakatan kepala desa memberikan sambutan. Hubungan timbal balik antara individu dan kelompok masyarakat terlihat ketika kepala desa memberikan sambutan pada kegiatan kemasyarakatan, yaitu pada acara pengajian akbar maupun forum kajian keagamaan (bukhori), pernikahan, maupun acara yang lainnya.

Dalam interaksi dengan masyarakat, kepala desa Kepuh dinilai sebagai sosok yang ramah, yaitu dengan selalu menyapa masyarakat dengan tidak memandang status sosial seseorang. Pola interaksi yang baik mempengaruhi hubungan timbal balik antara masyarakat dan kepala desa secara langsung. Adanya hubungan interaksi individu dengan kepala desa telah menimbulkan sebuah pemaknaan. Interaksi antara masyarakat dan kepala desa merupakan bentuk hubungan langsung antara penguasa dan rakyat. Dari interaksi yang berlangsung, akan membentuk suatu pemaknaan dalam masyarakat terhadap sosok kepala desa, dipandang dari kepribadiannya maupun kinerjanya. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil yg di peroleh dalam penelitian dimana indikator kedekatan pribadi masyarakat dengan sosok kepala desa di desa kepuh sendiri mencapai nilai persentase rata-rata hasil jawaban responden sebesar 91,4 %, dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa kepala desa Kepuh saat ini dan periode sebelumnya dikenal baik bagi masyarakatnya.

Politik dinasti menjadi tren dalam perkembangan politik di Indonesia saat ini, hal ini terlihat bagaimana banyak aktor politik yang telah menyiapkan anak atau keluarga para elite untuk masuk institusi yang disiapkan dimana tiada lain tujuannya adalah pelanggaran kekuasaan.

Praktik politik dinasti di beberapa daerah dalam kurun waktu terakhir yang di sorot media telah menjadi trending topic di dalam masyarakat kita, masyarakat pun semakin cerdas dalam menganalisis fenomena politik yang ada, hal ini menjadi suatu pendidikan politik yang bagus bagi masyarakat karena dengan kemudahan akses informasi membuat masyarakat kita semakin kritis .

Hal ini terbukti ketika Peniliti mencoba menggali data sejauh mana masyarakat kepuh dalam memahami apa itu politik dinasti di dalam data yang di hasilkan pemahaman masyarakat tentang politik dinasti didapatkan nilai persentase rata-rata hasil jawaban responden sebesar 88,6%.

Berbicara mengenai aktor-aktor politik tentu selalu berkaitan dengan jaringan atau siapa-siapa dibalik

kesuksesan si aktor tersebut dalam memperoleh tonggak kekuasaan. Hubungan kekerabatan atau jaringan yang dijalin aktor juga mengambil peran penting dalam mendorong kekuatan politik si aktor tersebut. Kepala Desa Kepuh sebagai aktor politik dalam bahasan ini juga menggunakan jaringan-jaringan kekerabatan yang ia miliki dalam menarik suara pemilih sehingga ia bisa memenangkan posisi kepala desa dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2012 tersebut.

Pada pemilihan kepala desa pada tahun 2012, Kepala Desa Kepuh sebagai kepala desa terpilih memperoleh dukungan penuh dari sebagian besar masyarakat Kepuh. Segala sumber-sumber daya yang dimilikinya maupun yang ada di desa Kepuh menjadi modal besar bagi Bapak David Wilianto dalam menghadapi pemilihan tersebut. Modal atau sumber daya tersebut menjadi kekuatan politik kepala desa Kepuh saat ini sehingga ia bisa mengalahkan para kandidat lainnya yang semuanya berjenis kelamin laki-laki.

Faktor pendukung tersebut sangat membantu kepala desa kepuh terpilih dalam memperoleh kekuatan politik dalam pemenangannya. Kekuatan politik yang dimiliki kepala desa yaitu berasal dari modal sosial dan politik yang ia miliki. Dalam mengikuti salah satu ajang politik yaitu pemilihan kepala desa, tentunya para calon-calon telah mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilihan tersebut agar dapat meraih kesuksesan dalam ranah ini. Modalitas adalah hal mutlak yang harus dimiliki para calon untuk mempersiapkan dirinya sebaik mungkin dalam pemilihan ini. Kepala desa Kepuh saat ini sebagai salah satu calon memiliki modal yang sangat berpengaruh besar dalam kesuksesannya terpilih menjadi kepala desa.

Adapun faktor pendukung kuatnya politik dinasti desa Kepuh saat ini salah satu modal yang dimiliki kepala desa Kepuh adalah modal sosial. Modal sosial adalah hubungan interaksi yang didasari oleh kepercayaan antara masyarakat dengan si aktor atau si calon. Modal sosial ini mengambil tempat yang strategis di kalangan masyarakat desa Kepuh, khususnya pada saat pemilihan kepala desa.

Ada 2 hal yang menjadi kekuatan politiknya sekaligus menjadi faktor penting kekuatan politik kepala desa Kepuh saat ini yaitu jaringan keluarga, dukungan tokoh masyarakat.

Kepala desa kepuh saat ini merupakan anak dari kepala desa sebelumnya yang pernah memimpin desa kepuh selama dua periode sebelumnya, dimana kepala desa terdahulu di pimpin oleh bapak Sumartono sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2006. Setelah habis masa jabatana Bapak Sumarsono, pada tahun 2006 Bapak Sumarsono mencalonkan putranya yang bernama David Wilianto kemudian terpilih kembali dengan periode kepemimpinan 2006-2012. Setelah periode jabatan

berakhir, pada tahun 2012 David Wilianto terpilih kembali menjadi Kades sampai saat ini.

Masyarakat desa kepuh memilih kembali David Wilianto dikarenakan keberhasilan kepala desa sebelum yang masih satu keluarga dengan kepala desa Kepuh saat ini hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh besar dari Ayahnya yaitu kepala desa sebelumnya dalam menentukan pilihan bagi masyarakat Kepuh.

Kepala desa terdahulu adalah ayah dari kepala desa saat ini yang sangat dihormati oleh masyarakat Kepuh, sejak menjabat sebagai kepala desa pertama di desa Kepuh. Pengaruh kebaikan dari kepala desa terdahulu membuat terpilihnya kepala desa saat ini dari satu keluarga yang sama dalam pemilihan tersebut. Pengaruh tersebut masih tertanam dalam diri masyarakat bahwa kebaikan dan perlakuan kepala desa terdahulu masih dirasakan sampai sekarang sehingga mereka masih yakin dan percaya kepada kepala desa yang terpilih saat ini.

Jaringan keluarga yang dimiliki kepala desa saat ini berasal dari siapa patron awal yang membentuk jaringan ini yang masih sangat dihormati dan dikenang oleh masyarakat kepuh. Kepala desa terdahulu menjadi ujung tombak dalam menanamkan kepercayaan dalam diri masyarakat Kepuh bahwa keturunan kepala desa terdahulu masih dipercaya memegang tombak kekuasaan di desa Kepuh. Latar belakang dari para kandidat juga merupakan hal penting yang masyarakat pertimbangkan sebelum menentukan pilihan mereka. Latar belakang keturunan yang ia miliki dimana keluarganya dihormati oleh masyarakat Kepuh menjadi salah satu modal sosial yang dapat ia gunakan dalam memperoleh dukungan masyarakat.

Dalam hal ini, Kepala desa yang menjabat saat ini mempunyai latar belakang keturunan yang melekat pada dirinya yang dianggap berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. Kekuatan politik aktor yang dimiliki kepala desa terdahulu menjadi modal utama yang ia miliki sebelum melebarkan pengaruh pengaruhnya kepada masyarakat. Latar belakang keturunan adalah modal awalnya.

Modal sosial yang dimiliki dapat membangun relasi antara dia dan masyarakat sehingga ia tidak susah payah dalam memenangkan hati rakyat. Modal sosial menawarkan betapa pentingnya suatu hubungan. Modal sosial ini sangat berperan penting dalam suatu pemilihan, misalnya dalam pemilihan kepala desa kali ini. Modal sosial yang dimiliki kepala desa saat ini membangun hubungan atau relasi kepada masyarakat. Hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial yang menghasilkan jaringan dan kepercayaan.

Atas dasar kepercayaan yang dimiliki masyarakat Kepuh kepada kepala desa saat ini adalah dampak dari latar belakang keturunan yang ia miliki dimana

masyarakat Kepuh masih percaya kepada keturunan sumartono dalam memimpin desa Kepuh. Kepercayaan masyarakat yang kuat ini berawal dari jalinan yang kuat masyarakat dengan kepala desa terdahulu sangat erat, hal tersebut kemudian diwariskan dan diceritakan kepada anak-anak mereka sehingga sampai sekarang masyarakat Kepuh masih tersimpan di hati masyarakat tentang keturunan dan kepopuleran keluarga tersebut.

Pemenangan David Wilianto sebagai kepala desa di desa Kepuh juga didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh di desa tersebut. Dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dapat menjadi kekuatan politik kepala desa saat ini. Tokoh-tokoh masyarakat di suatu desa dianggap sebagai orang-orang terpilih yang dilihat dan dijadikan panutan oleh masyarakat. Mereka diantaranya sebagian perangkat desa, pemilik pabrik dan orang-orang yang dianggap berpengaruh di desa ini.

Tokoh masyarakat menjadi pintu penting dan key person untuk mendapatkan simpati dan suara pemilih. Dalam masyarakat yang masih memiliki budaya politik tradisional, tokoh masyarakat adalah pilar strategis dalam menyukseskan dan merebut hati pemilih. Harus diakui, fakta sosial menunjukkan bahwa tokoh adalah kunci utama menggerakkan masyarakat, pembangunan dan perbaikan masyarakat.

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang mampu menggerakkan komunitas dan mampu menarik perhatian dan simpati masyarakat. Masyarakat yang telah percaya dan yakin kepada para tokoh masyarakat bisa saja mengikuti pilihan dari tokoh-tokoh masyarakat tersebut. Selain itu, mereka-mereka sangat berpotensi mendongkakan perolehan suara si calon tersebut. Dukungan yang dimiliki masyarakat oleh kepala desa saat ini dari tokoh-tokoh masyarakat kemudian dilihat oleh masyarakat bahwa kepala desa saat ini didukung oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang mereka percaya. Hal tersebut bisa menjadi pertimbangan masyarakat dalam memberikan suara pada pemilihan kepala desa tersebut.

Politik dinasti tidak bisa dilarang, karena menyangkut hak asasi setiap orang untuk menjadi pemimpin dan sebagai ekspresi demokrasi. Meski demikian, melanggengkan politik dengan memajukan istri, anak, saudara, atau kerabat menggantikan kedudukannya sebagai pejabat publik berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bertanah air. Sebab, terjadi kemacetan demokrasi, akibat tersumbatnya kaderisasi beberapa generasi. Di samping itu, politik dinasti sangat rawan menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga dapat merusak tatanan sosial, sekaligus merusak pemimpin itu sendiri beserta keluarganya. Pemimpin yang berakhir masuk penjara karena korupsi, selain menghancurkan nama baik keluarga, juga memperlakukan seluruh rakyat yang dipimpinnya.

Setidaknya ada dampak negatif dari praktik politik dinasti. Yaitu:

Pertama, politik dinasti akan menghambat fungsi ideal kontesasi politik. Calon yang dipilih bukan calon yang telah terseleksi dan melalui proses kaderisasi, melainkan hanya berdasarkan popularitas dan kekerabatan dengan petahana.

Kedua, tertutupnya kesempatan bagi masyarakat yang memiliki kapasitas dan keunggulan untuk tampil sebagai pemimpin karena bukan berasal dari lingkaran elite kekuasaan. Jika hal ini terjadi, akan muncul potensi terjadinya negosiasi dan konspirasi kepentingan dalam pelaksanaan tugas pemerintah.

Ketiga, sulitnya mencapai clean and good governance karena fungsi kontrol melemah dan semakin tingginya potensi korupsi, kolusi dan nepotisme. Politik dinasti, dapat membuat orang yang tidak berkompeten menduduki suatu jabatan, dan juga sebaliknya, menghalangi seseorang yang berkompeten untuk tampil menjadi abdi masyarakat.

Tetapi, mengembalikan pertimbangan pemilihan calon berdasarkan kualitas dan kapasitas individu, karena tidak menutup kemungkinan calon yang berasal dari politik dinasti tertentu memang lebih baik dari pada calon lain karena mengalami proses kaderisasi yang lebih matang dan intensif. Dan jika calon yang dimaksud hanya mengandalkan popularitas dan jejaring politik yang terbentuk dalam suatu dinasti, maka masyarakat perlu berpikir ulang.

Politik dinasti bukan tidak baik bagi perkembangan pemerintahan Indonesia, namun akan menjadi sangat tidak baik apabila calon-calon yang dimandatkan untuk memimpin rakyat adalah bukan calon yang kompeten pada bidangnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa yang seringkali banyak terjadi pada kehidupan masyarakat adalah munculnya calon pemimpin daerah yang bukan merupakan calon yang kompeten untuk memimpin daerah dan rakyatnya. Ringkasnya, mengenai sifat baik buruk politik dinasti pada dasarnya memang akan sangat bergantung pada pendasaran dan filsafat politik apa yang kita anut.

Namun berdasarkan data yang peneliti peroleh dari masyarakat Desa Kepuh dengan menggunakan angket yang disebar dapat diketahui bahwa 80,8% masyarakat menganggap bahwa politik dinasti kepala Desa nya merupakan hal yang wajar terjadi dan mereka pun masih mendukung pemerintahan yang saat ini berlangsung.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan pembahasan dalam tentang persepsi masyarakat tentang politik dinasti

dapat dikemukakan simpulan bahwa masyarakat memahami bahwa

Keluarga kepala Desa mampu membangun kedekatan hubungan dengan masyarakat dan memiliki pengaruh dalam pemilihan sebesar 91,4% yang meliputi kepopuleran pribadi dan calon penerusnya, hingga kinerja pemimpin terdahulu

Pengetahuan masyarakat tentang politik dinasti sebesar 88,5% yang meliputi pelaksanaan kekuasaan yang turun menurun, politik dinasti sebagai strategi politik mempertahankan kekuasaan, politik dinasti sebagai tren politik, hingga tidak dilarangnya politik dinasti di Indonesia

Pemahaman masyarakat adanya faktor pendukung kuatnya politik dinasti sebesar 90,14% yang meliputi sebab terjadinya politik dinasti, jaringan kekuasaan pimpinan terdahulu, adanya politik balas budi dan politik uang.

Kesadaran masyarakat akan dampak negatif yang akan ditimbulkan politik dinasti sebesar 89,83 % yang meliputi adanya penyelewengan kekuasaan, matinya kesempatan bagi pemimpin baru yang handal dan berkualitas, nilai dan prinsip demokrasi yang kurang tercapai, hingga kualitas pemimpin yang terpilih

Anggapan politik dinasti kepala desa adalah wajar dan sah sebesar 80,1%.

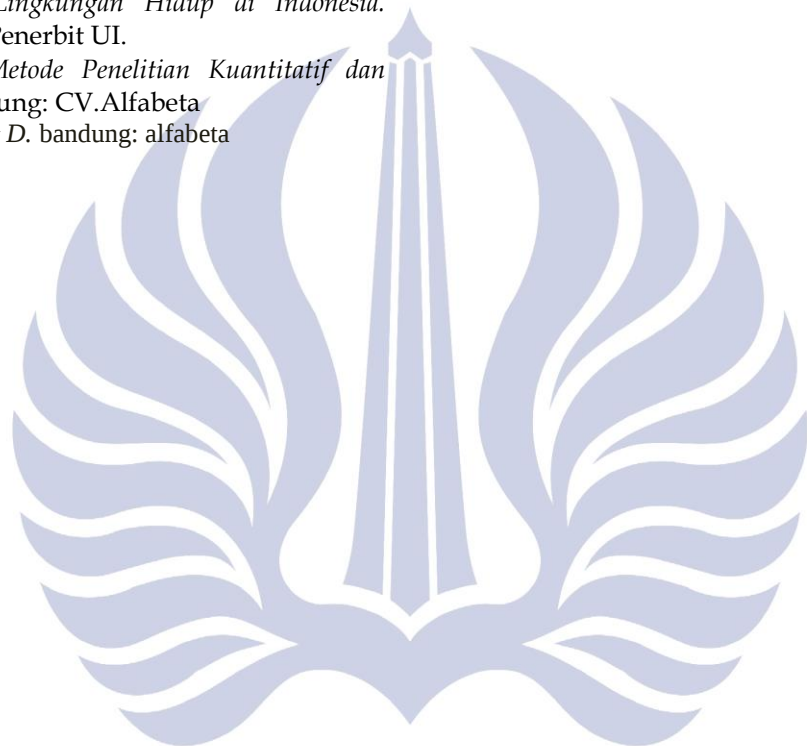
Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap politik dinasti kepala desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, maka penulis dapat mengajukan saran – saran yang berkaitan tentang politik dinasti yaitu: 1. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu hendaknya para pemimpin mampu memberikan pendidikan politik yang demokratis kepada masyarakatnya, 2. Masyarakat harus mampu bersikap aktif dan kritis terhadap politik lokal dan dalam menentukan kriteria pemimpin mampu menilai secara keseluruhan baik sisi kapasitas dan kapabilitas calon yang akan di pilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Pasan, Etha. 2013. *Politik Dinasti Dalam Pemilihan Presiden di Filipina di Tahun 2001-2011*.
- Poerwadarminto. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Rakhmat, Jalaluddin. 2000. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ridwan.(2007). *Skala Pengukuran Variabel- Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sarwono, Sarlito W. 1995. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sobur, Alex.(2003).*Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sabri, Alisuf.(1999). *Psikologi Umum dan Perkembangan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Soeminaro, Slamet. 2010. *Buku Ajar III Bangsa, Budaya, dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Balai Penerbit UI.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.Bandung: CV.Alfabeta
- dan kualitatif dan R& D. bandung: alfabeta



UNESA

Universitas Negeri Surabaya